

Kritik M. Umer Chapra terhadap Kapitalisme dan Sosialisme: Mencari Alternatif dalam Ekonomi Islam

Nasya Silmi Auna Nida Ulhusna¹, Diva Tiara Avanty², Muhammad Fathin Muyassar³
Muhammad Fikri Aulia Amrullah⁴, Sari Widya Astutik⁵, Nurul Azizah⁶, Muhammad
Akhdan Rafif⁷

1nasya_7ulhusna@apps.ipb.ac.id, divaavanty@apps.ipb.ac.id, akhdanrafif@apps.ipb.ac.id, 306nurulazizah@apps.ipb.ac.id,
sariwidyaastutik@apps.ipb.ac.id, fikriaulia@apps.ipb.ac.id, muyassarunmuyassar@apps.ipb.ac.id

Abstrack

Conventional economic systems such as conventional capitalism, socialism, and the welfare state have long dominated the global economy, but each has significant weaknesses. Capitalism creates economic inequality, socialism faces inefficiency, and the welfare state is constrained by fiscal poverty. Alternatively, Islamic economics offers the principles of monotheism, equity, and justice, integrated with the maqashid sharia, making it more relevant to addressing modern challenges such as digitalization and environmental destruction.

The thinking of Umer Chapra, a prominent Islamic economist, provides a theoretical framework that is critical of the conventional system while offering the concept of the Islamic Welfare State as a solution. This study analyzes the weaknesses of the conventional economic system, explores the principles of Islamic economics, and disseminates the relevance of Chapra's strategies, such as the use of sharia instruments (green sukuk) and Islamic value-based reforms.

The results show that Chapra's approach is relevant in addressing socio-economic inequality and supporting sustainable development, especially in the Indonesian context. The application of the principles of monotheism, equity, and justice through zakat, waqf, and the prohibition of usury can create a more just, inclusive, and stable economic system. Thus, Islamic economics has the potential to be a sustainable alternative in creating holistic welfare.

Keywords: Islamic Economics, Umer Chapra, Capitalism, Socialism, Tawhid, Equality, Justice, Maqashid Syariah, Digitalization, Sustainability.

Abstrak

Sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme, sosialisme, dan negara sejahtera telah lama mendominasi perekonomian global, namun masing-masing memiliki kelemahan signifikan. Kapitalisme menciptakan ketimpangan ekonomi, sosialisme menghadapi inefisiensi, dan negara sejahtera terkendala keberlanjutan fiskal. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan prinsip tauhid, pemerataan, dan keadilan, yang terintegrasi dengan maqashid syariah, menjadikannya lebih relevan untuk menjawab tantangan modern seperti digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan.

Pemikiran Umer Chapra, seorang ekonom Islam terkemuka, memberikan kerangka teori yang kritis terhadap sistem konvensional sekaligus menawarkan konsep Islamic Welfare State sebagai solusi. Penelitian ini menganalisis kelemahan sistem ekonomi konvensional, mengeksplorasi prinsip ekonomi Islam, dan mengevaluasi relevansi strategi Chapra, seperti penggunaan instrumen syariah (sukuk hijau) dan reformasi struktural berbasis nilai Islam.

Dalam hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan Chapra relevan dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Indonesia. Implementasi prinsip tauhid, pemerataan, dan keadilan melalui zakat, wakaf, serta larangan riba dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan stabil. Dengan demikian, ekonomi Islam berpotensi menjadi alternatif yang berkelanjutan dalam menciptakan kesejahteraan yang holistik.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Umer Chapra, Kapitalisme, Sosialisme, Tauhid, Pemerataan, Keadilan, Maqashid Syariah, Digitalisasi, Keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme, sosialisme, dan negara sejahtera telah lama menjadi fondasi perekonomian global. Namun, sistem-sistem ini menunjukkan berbagai kelemahan yang signifikan. Kapitalisme, misalnya, menghasilkan ketimpangan ekonomi yang besar, dengan 10% orang terkaya dunia menguasai 76% kekayaan global, sementara 50% orang termiskin hanya memiliki 2% (World Inequality Lab, 2022). Sosialisme sering kali menghadapi masalah efisiensi ekonomi, seperti yang terlihat dalam stagnasi ekonomi Uni Soviet akibat kurangnya insentif untuk inovasi (Hoover Institution, 2019). Sementara itu, negara sejahtera mengalami tantangan keberlanjutan fiskal, dengan banyak negara seperti Prancis dan Italia menghadapi defisit besar karena beban sistem kesejahteraan (OECD, 2022).

Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem berbasis tauhid, pemerataan, dan keadilan, yang terintegrasi dengan maqashid syariah. Prinsip ini menekankan distribusi kekayaan yang adil dan keseimbangan antara kebutuhan individu serta kemaslahatan kolektif. Popularitas sistem ini terus meningkat, dengan aset keuangan Islam diproyeksikan mencapai \$3,69 triliun pada 2024 (Thomson Reuters, 2022). Namun, ekonomi Islam juga harus beradaptasi untuk menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, sektor digitalisasi

berkontribusi pada 4% emisi karbon global (International Energy Agency, 2021), sehingga pendekatan etis dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan mendesak.

Pemikiran Umer Chapra, seorang ekonom Islam terkemuka, memberikan kerangka teoritis untuk menjawab tantangan ini. Chapra mengintegrasikan prinsip maqashid syariah ke dalam strategi yang relevan dengan kebutuhan modern, seperti regulasi berbasis nilai dan pemberdayaan komunitas. Selain itu, penerapan instrumen syariah seperti sukuk hijau di Indonesia yang berhasil mengumpulkan \$1,25 miliar pada 2018 menunjukkan bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara praktis (Bank Indonesia, 2018). Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang adil, berkelanjutan, dan relevan untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional. Dalam kajian ekonomi modern, dua sistem dominan yaitu kapitalisme dan sosialisme kerap diperdebatkan terkait efektivitasnya dalam menciptakan kesejahteraan. Kapitalisme, yang bertumpu pada kebebasan pasar dan prinsip *laissez-faire*, sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial akibat minimnya intervensi negara. Sebaliknya, sosialisme, dengan fokus pada peran negara dalam mengontrol distribusi sumber daya, mengalami tantangan berupa inefisiensi dan stagnasi.

Penelitian terdahulu mengungkap bahwa kedua sistem ini belum sepenuhnya mampu memenuhi tujuan keadilan sosial

yang diharapkan. Sebagai tanggapan atas kebuntuan tersebut, M. Umer Chapra, seorang ekonom Islam terkemuka, mengajukan kritik mendalam terhadap kapitalisme dan sosialisme serta menawarkan konsep *Islamic Welfare State* sebagai solusi alternatif. Dalam pandangannya, kapitalisme gagal karena mengabaikan nilai moral dan etika, sementara sosialisme tidak mampu mendorong partisipasi individu secara optimal dalam ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kritik Chapra tidak hanya komprehensif tetapi juga relevan dalam konteks kekinian, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Umam dan Jalaludin (2023) menemukan bahwa konsep kesejahteraan Chapra berpotensi menjadi solusi bagi tantangan ekonomi Indonesia yang masih diwarnai oleh korupsi, ketimpangan sosial, dan kebijakan yang tidak konsisten. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa nilai-nilai Islam yang ditanamkan Chapra, seperti keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Chapra juga menekankan pentingnya reformasi struktur sosial-ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, dan ketimpangan. Oleh karena itu, mengkaji lebih dalam pemikiran Chapra menjadi penting untuk menemukan alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada hasil material tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan moral.

Kritik Chapra terhadap kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme juga relevan dengan situasi di Indonesia, di mana

kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi isu utama. Dalam konteks ini, pandangan Chapra dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan ekonomi nasional yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan relevansi pemikiran Chapra terhadap konteks Indonesia dan global, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut kritik Chapra terhadap kapitalisme dan sosialisme serta bagaimana konsep negara kesejahteraan Islam dapat menjadi alternatif yang layak dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Apa kelemahan utama dari sistem ekonomi konvensional (kapitalisme, sosialisme, dan negara sejahtera) dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi?
2. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, pemerataan, dan keadilan dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan?
3. Bagaimana strategi-strategi yang diusulkan oleh M. Umer Chapra dalam merancang sistem ekonomi Islam dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan baru, seperti digitalisasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kelemahan sistem ekonomi konvensional, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan negara sejahtera, dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

2. Mengkaji prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tauhid, pemerataan, dan keadilan, sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
3. Mengeksplorasi dan mengevaluasi strategi yang diusulkan oleh M. Umer Chapra dalam sistem ekonomi Islam untuk menghadapi tantangan modern, termasuk digitalisasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

PEMBAHASAN

Kelemahan Utama Sistem Ekonomi Konvensional

M. Umer Chapra, seorang ekonom kelahiran Pakistan pada 1 Februari 1933, memiliki kewarganegaraan Pakistan dan kemudian menetap di Arab Saudi. Sejak tahun 1995, ia menjabat sebagai penasihat ekonomi senior di Monetary Agency Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman dalam mengajar dan melakukan penelitian di bidang ekonomi (Yuliadi, 2001). Chapra menghabiskan masa kecilnya di Pakistan hingga usia 15 tahun, sebelum pindah ke Karachi untuk melanjutkan pendidikan. M. Umer Chapra meneruskan pendidikan strata satu dan magister di Karachi, Pakistan dan kemudian meraih gelar Ph.D. pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat cum laude di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama (Mulyadi, 2013).

Mengutip dari salah satu buku karya beliau "*Islam and Economic Challenge*" dalam buku ini menjelaskan aspek ekonomi Islam dan mengkritisi sistem ekonomi Barat. Menurut Chapra kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang sangat jelas terlihat oleh berkuasanya. Harga pasar dijadikan keputusan dasar

dan perhitungan unit yang diproduksi tidak ditentukan oleh pemerintah merupakan salah satu ciri utama dari sistem kapitalisme. Tidak adanya perencanaan ataupun kontrol dari pemerintah itulah yang membuat pelaku ekonomi (*low capital*) melemah karena sulit berkembang dan terpinggirkan sebab tidak adanya akses modal yang merata. Hadirnya kapitalisme menciptakan sikap condong pada kepentingan pribadi dibanding kepentingan sosial dan mengesampingkan nilai serta moralitas.

Ideologi politik dan ekonomi yang menganjurkan kepemilikan bersama serta distribusi kekayaan lebih merata di masyarakat adalah gambaran dari sosialisme. Kepemilikan negara merupakan sistem yang digunakan menggantikan sistem kapitalisme atau *private property*. Chapra menjelaskan sistem sosialisme tidak percaya terhadap kemampuan manusia mengelola kepemilikan secara pribadi namun seharusnya mendorong individu untuk memberikan upaya terbaik dan dikendalikan oleh pemerintah.

Konsep negara sejahtera diusulkan sebagai salah satu solusi efektif untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme. Chapra menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dengan indikator ekonomi seperti kekayaan dan tingkat konsumsi. Sebaliknya, ia berargumen bahwa kesejahteraan sejati juga harus mencakup dimensi spiritual dan moral.

Tujuan utama dari penerapan konsep negara sejahtera adalah untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Negara sejahtera berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan semua warganya. Kebijakan publik yang diterapkan dalam kerangka

negara sejahtera harus bersifat inklusif dan responsif terhadap berbagai masalah sosial yang muncul. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah perlindungan yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok rentan dan menyediakan layanan yang memadai bagi mereka.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ajaran Islam bersifat universal, sederhana, logis, dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dengan keseimbangan antara ketetapan prinsip dan fleksibilitas penerapan. Islam mudah dipahami, melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, pemerataan, dan keadilan dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

1. Tauhid

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Konsep ini mendorong manusia untuk memandang harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Tauhid menekankan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk dalam ekonomi, adalah ibadah kepada Allah. Aktivitas ekonomi harus selaras dengan syariat dan bertujuan mencapai ridha-Nya.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْأَنْهَارَ

"Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu Dia

mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu." (QS. Ibrahim: 32)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Dalam implementasinya, motivasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga manfaat sosial dan ukhrawi. Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah dari Allah, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Praktik bisnis didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Manusia didorong untuk menghindari sifat tamak dan konsumerisme berlebihan. Perusahaan dan individu dituntut untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Pemerataan

Prinsip pemerataan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh anggota masyarakat. Islam mendorong distribusi kekayaan secara adil untuk mencegah ketimpangan sosial dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."
(QS. At-Taubah: 103)

Implementasinya dalam sistem ekonomi ialah misalnya pada pembatasan monopoli sehingga mencegah kekuasaan ekonomi yang terpusat pada segelintir orang atau kelompok. Kemudian koperasi sebagai pendorong pembentukan pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah.

Zakat dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi yang langsung mengalirkan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Dengan mekanisme zakat dan sedekah, sistem ini mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko krisis. Begitu juga wakaf yang mampu meningkatkan pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Pemerintah berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

3. Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kezaliman. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran."
(QS. An-Nahl: 90)

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam. Dalam

konteks ekonomi, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya tanpa ada pihak yang dirugikan. Ini diwujudkan melalui: Melindungi semua pihak dalam perjanjian bisnis, termasuk pekerja, produsen, dan konsumen, melalui kontrak yang adil; Menetapkan harga yang wajar untuk mencegah monopoli dan praktik eksploitasi; Membuka peluang yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi; Pelarangan praktik riba yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan karena memperkaya pihak yang meminjamkan uang dengan cara yang tidak wajar. Dengan menghindari riba dan spekulasi, ekonomi Islam meminimalkan risiko krisis keuangan akibat gelembung ekonomi atau ketidakpastian pasar.

Strategi-Strategi Umer Chapra dalam Merancang Ekonomi Islam

Mengutip dari pemikiran Umer Chapra tujuan dari Ilmu Ekonomi adalah mendukung tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas khalifah di muka bumi ialah beribadah kepada Allah SWT, menjadi pemimpin, menjaga keadilan, dan menjaga lingkungan.

Kehidupan di bumi tentunya tidak berjalan tanpa masalah, dari zaman ke zaman masalah yang dihadapi pastinya bermacam-macam dan semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman. Masalah yang dihadapi di masa sekarang ini contohnya ialah digitalisasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Bagaimana menyelesaikan masalah ini dikaitkan dengan pemikiran Umer Chapra.

1. Digitalisasi Ekonomi

Era sekarang ini sebagian besar sektor ekonomi sudah berjalan di ranah digital. Dimulai dari hulunya seperti sektor pasar modal hingga ke hilirnya yaitu

kegiatan konsumsi oleh konsumen. Banyaknya kegiatan ekonomi yang bergantung pada sektor digital tentunya membutuhkan banyak hal agar tidak keluar dari prinsip syariah.

Pertama, kuatkan regulasi dari pemerintah. Menurut Chapra, pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur pasar melalui regulasi-regulasinya. Regulasi ini penting agar perusahaan teknologi tidak memonopoli pasar dan melindungi hak-hak konsumen.

Kedua, pengembangan aplikasi keuangan syariah. Sektor keuangan merupakan salah satu yang berkembang pesat di era digitalisasi ini. Marak bermunculan aplikasi-aplikasi pinjaman online, cryptocurrency, dan aplikasi-aplikasi yang berbasis spekulasi dan riba lainnya. Menurut Chapra cara menjaga stabilitas ekonomi salah satunya adalah pengurangan spekulasi dan transaksi yang berbasiskan riba. Salah satu yang bisa dilakukan di era digital ini adalah bersaing sengan mengembangkan aplikasi keuangan syariah seperti fintech syariah, investasi syariah, dan lainnya yang terbebas dari riba.

Ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat. Digitalisasi ekonomi yang berkembang pesat menguntungkan masyarakat yang terjangkau dan ahli dalam teknologi. Chapra mendukung pembangunan ekonomi yang seimbang dan inklusif, maka dari literasi teknologi harus diperkuat di semua kalangan masyarakat. Hal ini untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya menguntungkan kepentingan perusahaan besar.

2. Keberlanjutan Lingkungan

Isu keberlanjutan lingkungan ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Alasan

ramainya perbincangan mengenai isu keberlanjutan lingkungan karena bumi yang sudah semakin rusak akibat pola konsumsi manusia konvensional yang selalu tidak merasa cukup. Menurut Chapra ada beberapa aspek yang harus diperhatikan terkait isu keberlanjutan lingkungan.

Pertama, cara memandang bahwa segala sesuatu itu adalah amanah (titipan) yang harus dijaga. Manusia hidup di muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang bertugas mengelola dunia dan seisinya. Sumberdaya yang ada di dunia harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan percaya bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kedua, larangan pemborosan (*israf*) dan berlebih-lebihan (*tabzir*). Allah sudah menciptakan dunia dan seisinya dengan porsi yang cukup untuk semua kebutuhan makhluk-Nya. Perilaku pemborosan dan berlebih-lebihan berarti memakan hak orang lain dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, gaya hidup hemat dan sederhana dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif untuk lingkungan.

3. Menghidupkan Faktor Kemanusiaan

Untuk mencapai tujuan dalam lingkungan politik yang mendukung, penting untuk mendorong peran manusia dalam mengupayakan alokasi sumber daya yang efisien dan distribusi yang adil. Individu diharapkan berkomitmen untuk bekerja keras secara efektif, menunjukkan integritas, kejujuran, dan disiplin. Selain itu, mereka perlu mengubah pola konsumsi, meningkatkan kebiasaan menabung, dan melakukan investasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja, mempercepat

pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketidakseimbangan makroekonomi. Semua ini bertujuan untuk merealisasikan maqashid (Sunjoto, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem ekonomi konvensional, seperti kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan, memberikan ruang bagi sistem alternatif yang lebih holistik dan berkeadilan. Kapitalisme cenderung menciptakan ketimpangan sosial akibat fokus yang berlebihan pada kepentingan pribadi dan keuntungan material. Sebaliknya, sosialisme sering kali menghadapi masalah inefisiensi akibat kurangnya insentif individu. Negara kesejahteraan, meskipun menawarkan solusi untuk berbagai kelemahan sistem konvensional, menghadapi tantangan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip tauhid, pemerataan, dan keadilan, muncul sebagai solusi alternatif yang komprehensif. Tauhid menanamkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, pemerataan mendorong distribusi kekayaan yang adil untuk mencegah konsentrasi kekayaan di segelintir orang, sedangkan prinsip keadilan memastikan hak setiap individu terpenuhi tanpa ada eksploitasi. Mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pemerataan sosial.

Pemikiran M. Umer Chapra menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi dapat menjawab tantangan modern, termasuk digitalisasi dan keberlanjutan lingkungan. Strategi Chapra, seperti regulasi berbasis nilai, pemberdayaan komunitas, dan penerapan instrumen syariah seperti sukuk hijau, memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks global maupun lokal, termasuk di Indonesia.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial ke dalam kerangka ekonomi, konsep negara kesejahteraan Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya relevan sebagai alternatif untuk sistem konvensional, tetapi juga sebagai paradigma baru yang mampu menjawab berbagai tantangan global di masa depan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2018). *Sukuk Hijau dan Keberlanjutan di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Hoover Institution. (2019). *Economic Growth in Socialist Economies*. Stanford: Hoover Institution.
- International Energy Agency. (2021). *Digitalization and Energy*. Paris: IEA.
- Mulyadi, D. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 171-182.
- Naqiyya, A. N. A., Hidayati, N., Widamayanti, S. E., & Marwati, S. D. "Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M. Umer Chapra." *Istithmar* 7.1 (2023): 50-65.
- OECD. (2022). *Economic Outlook 2022*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

- Sunjoto, A. R. (2018). Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Islamic Economic Journal*, Vol. 4(1), 13.
- Thomson Reuters. (2022). *Global Islamic Finance Development Indicator*. New York: Thomson Reuters.
- World Inequality Lab. (2022). *World Inequality Report 2022*. Paris: World Inequality Lab.
- Yuliadi, I. (2001). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI.
- Umam, Khoirul. "Umer Chapra's Critique of The Western Concept of Welfare State." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 11.2 (2023): 128-155.
- Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra." *Islamic Economics Journal* 2.1 (2013): 1-18.